

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu isu *low politics* yang terus mengalami perkembangan adalah *human trafficking*. *Human trafficking* menurut United Nations adalah segala bentuk tindakan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan ataupun tindakan penerimaan orang, dengan ancaman atau paksaan yang menggunakan kekerasan, penculikan penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, meraup keuntungan, memperoleh kendali atas orang lain, dalam hal eksploitasi. Eksploitasi dimaksud termasuk didalamnya eksploitasi prostitusi atau tindakan eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan atau praktik-praktik yang menyerupai perbudakan atau pengangkatan organ tubuh.¹ *Human trafficking* marak terjadi di negara-negara berkembang salah satunya adalah Thailand, posisi Thailand yang berada di tengah-tengah kawasan Asia tenggara dikelilingi oleh negara-negara miskin menjadikan Thailand tempat transit, sumber dan juga menjadi negara tujuan baik bagi para pelaku *human trafficking*. Tidak hanya itu negara Thailand juga menjadi negara favorit bagi para migran yang ingin untuk mencari kehidupan yang lebih layak dengan upah kerja yang lebih besar.²

Human trafficking yang terjadi di Thailand diantaranya adalah *sex trafficking* dan *labor trafficking*. *Labor trafficking* sudah lama terjadi di Thailand, dalam sebuah tulisan menjelaskan bahwa, pada tahun 1980an di Thailand yang mengalami pertumbuhan eksponensial dan berdampak terhadap kebutuhan

¹ United Nations. "Human Rights and Human Trafficking: Fact Sheet No. 36." United Nations Human Rights Office of the High Commissioner Fact Sheet, no. 36 (2014): 70.

² Janie A. Chuang, *Preventing Human Trafficking, Fighting Modern Slavery and Human Trafficking*, 2021.

Thailand terhadap buruh untuk bekerja di sektor *3D Jobs (difficult, dirty, and dangerous)*. Sektor pekerjaan tersebut banyak dihindari masyarakat Thailand karena upah kerja yang tidak sebanding dengan pekerjaan yang dilakukan menyebabkan ketidakseimbangan antara *supply* dan *demand* terkait kebutuhan buruh. Hal tersebut menyebabkan Thailand membutuhkan para pekerja dari luar atau migran dalam memenuhi kebutuhan terhadap buruh pekerja pabrik yang menjadi salah satu faktor munculnya *labor trafficking*.³

Jumlah migran yang datang ke Thailand dari tahun ke tahun terus meningkat, walaupun keberadaan para migran tersebut memberikan dampak yang positif dalam perkembangan ekonomi negara Thailand, tercatat pada Agustus 2022 setidaknya jumlah migran aktif bekerja yang terdaftar di Thailand sebanyak 2.167.937. Peran migran dalam perkembangan ekonomi Thailand dapat dilihat dalam sebuah data pada tahun 2010 yang dikeluarkan oleh ILO, tercatat para migran telah berkontribusi sebesar 4,3-6,6% terhadap GDP Thailand.⁴ Sebagian besar migran tersebut didominasi oleh migran yang berasal dari Myanmar, setidaknya ada sekitar 3 juta pekerja yang berasal dari Myanmar yang bekerja di Thailand dan dua pertiga dari mereka masuk ke Thailand secara ilegal tidak memiliki dokumen-dokumen perjalanan yang resmi. Namun permasalahannya peningkatan jumlah migran yang masuk ke Thailand berbanding lurus dengan kemungkinan para pekerja tersebut menjadi korban dari *labor trafficking*,

³ Von Feigenblatt, Otto Federico. "Human Trafficking in Thailand: The Complex Contextual Factors." *Journal of Asia Pacific Studies* (2021) Volume 6 (2021): 137-146

⁴ Chiang Mai, Mae Sot, dan National Project Coordinator, "TRIANGLE in ASEAN Quarterly Briefing Note Thailand (July – September 2022) TRIANGLE in ASEAN Quarterly Briefing Note Key developments Thailand at a glance," no. September (2022).

diperkirakan sebanyak 57% pekerja yang bekerja di Thailand menjadi korban *labor trafficking*.⁵

Dalam menanggapi permasalahan tersebut Pemerintah Thailand mengambil tindakan untuk memberikan keringanan kepada migran dalam hal memasuki negara Thailand melalui MoU Kerjasama ketenagakerjaan pada tahun 2002 dan 2003 yang ditandatangani oleh Pemerintah Thailand bersama dengan Kamboja, Laos, dan Myanmar guna mengurangi jumlah migran ilegal yang masuk.⁶ Pada tahun 2016-2018 Thailand mengembangkan kerangka hukum yang akan sejalan dengan MoU Sebelumnya disebut dengan *Royal Ordinance*. Kerangka hukum mengatur tentang manajemen ketenagakerjaan migran, dikarenakan hanya sebagian kecil migran yang mendaftar dibawah MoU sebelumnya akibat kompleksitas prosedur yang rumit dan panjang serta membutuhkan biaya yang mahal. Walaupun MoU tersebut mendapatkan pembaharuan mencakup perluasan kerjasama dalam masalah ketenagakerjaan, memberikan perlindungan sosial dan juga pengembangan keterampilan serta memperluas kerjasama dengan menandatangani perjanjian baru dengan Vietnam. Melalui kerangka hukum tersebut menjadi satu-satunya jalan bagi para migran untuk dapat masuk ke negara Thailand sebagai pekerja secara resmi, namun dalam bagian 64 *Royal Ordinance* tersebut ada satu pengecualian yang dikenal dengan *Border Employment Regulation*, pengecualian tersebut memberikan kebebasan bagi perusahaan untuk merekrut pekerja di daerah perbatasan dengan visa selama

⁵ Sihotang, Natalia, and Channarong Wiriya. "Human Trafficking in Thailand in Perspective of Human Rights Law." *Journal of Law and Legal Reform* 2, no. 4 (1 Agustus, 2021): 505–514. diakses pada 21 November 2021. <https://doaj.org/article/bc4fbd1be31f4941a5d746eff693af7e>.

⁶ Chiang Mai, Mae Sot, dan National Project Coordinator.

tiga bulan, pengecualian tersebut menyebabkan adanya celah yang dimanfaatkan oleh para pelaku dalam melakukan *labor trafficking*.⁷

Upaya Thailand dalam melawan *labor trafficking* sebenarnya telah dimulai pada tahun 1998 melalui *labor protection act B.E. 2541* yang mengatur tentang perlindungan hak-hak pekerja di Thailand, dilanjutkan dengan *Anti-Trafficking in Persons B.E. 2551* yang merupakan kerangka hukum utama dalam melawan *human trafficking*. Namun komite *Anti-Trafficking in Persons* mendapati permasalahan dalam mengidentifikasi *labor trafficking*, dikarenakan pelanggaran yang ditemui biasanya akan dijerat ke dalam hukum *labor protection act B.E. 2541*. Walaupun dilaporkan adanya kasus terhadap pelanggaran *Anti-Trafficking in Persons*. Hal ini dibuktikan dengan kegagalan penegak hukum untuk dapat mengidentifikasi satu kasus yang terkait dengan *labor trafficking*.⁸

Keseriusan Thailand dalam melawan *labor trafficking* mulai terlihat pada tahun 2015 dikarenakan adanya tekanan yang diterima oleh pemerintah Thailand setelah beberapa laporan yang ditampilkan di berita menjelaskan bahwa banyaknya terjadi praktik tenaga kerja budak di industri laut Thailand dan *Associated Press* merilis laporan tentang hampir 4000 korban terdampar ke pulau-pulau kecil di Indonesia.⁹ Berita tersebut menarik perhatian internasional termasuk dari Amerika Serikat dan Uni Eropa yang menjadi konsumen terbesar Thailand

⁷ *Working and Employment Conditions in the Agriculture Sector in Thailand: A Survey of Migrants Working on Thai Sugarcane, Rubber, Oil Palm and Maize Farms*, n.d., https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_844317.pdf.

⁸ The United States Department of State, *Comments Concerning the Ranking of Thailand by the United States Department of State in the 2021 Trafficking in Persons Report Comments Submitted by Global Labor Justice-International Labor Rights Forum on Behalf of the Seafood Working Group*, 2021

⁹ Surangrut Jumnianpol dan Nithi Nuangjamnong, "Human Security Norms in East Asia," *Human Security Norms in East Asia* (2019): 227–247.

pada industri perikanan, Uni Eropa memberikan “*yellow card*” kepada Thailand terkait dengan penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur yang akan merugikan para pekerja tersebut.¹⁰ Thailand sendiri memberikan dukungan penuh dalam hal pendanaan untuk melawan *human trafficking*, total dana yang dikerahkan mencapai 2.08 miliar Baht (\$58.15 juta) pada tahun 2016 dan meningkat menjadi 2.58 miliar Baht (\$72.1 juta) pada tahun berikutnya.¹¹ Namun hal tersebut tidak memberikan hasil yang diharapkan, Thailand dikategorikan ke Tier 2 dalam sebuah laporan US State Trafficking in Persons yang menjelaskan bahwa Thailand belum memenuhi standar yang ditetapkan menurut *Trafficking Victims Protection Act* (TVPA) namun Thailand telah melakukan beberapa upaya dan usaha dalam mengikuti standar yang ditetapkan TVPA untuk melawan kasus *human trafficking* terutama *labor trafficking*.

Dengan berbagai usaha yang telah dilakukan Thailand dalam melawan *labor trafficking* namun usaha tersebut tidak memberikan pengaruh besar dalam mengentaskan *labor trafficking*, dalam sebuah data ditemukan setidaknya 57% pekerja di Thailand merupakan korban dari *labor trafficking*. Pada tahun 2022 sendiri jumlah migran yang bekerja secara resmi terdaftar di Thailand mencapai 2.167.937, angka tersebut belum termasuk jumlah migran yang masuk ke Thailand secara ilegal. US State Trafficking in Persons menjelaskan bahwa keuntungan yang diraup oleh para pelaku kejahatan diperkirakan dapat mencapai 181 Juta USD jika kasus *human trafficking* Thailand dan Filipina digabungkan.

¹⁰ European Commission, “Press Corner,” *European Commission - European Commission*, terakhir diubah pada 2022, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/%20en/IP_15_4806.

¹¹ “Thailand - United States Department of State,” *United States Department of State*, diakses 26 December 2022, <https://www.state.gov/reports/2017-trafficking-in-persons-report/thailand/>.

Berdasarkan penjelasan di atas, *labor trafficking* terus mengalami peningkatan khususnya di Thailand. Pemerintah Thailand sendiri telah berupaya baik dalam lingkup domestik seperti membentuk kebijakan, dan lingkup regional pemerintah Thailand bekerjasama dengan negara-negara yang juga mengalami permasalahan serupa dan dalam lingkup internasional Thailand mengimplementasikan kerangka hukum yang diadopsi dari *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC) dalam melawan *labor trafficking*, namun upaya tersebut tidak memberikan hasil yang diharapkan. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam menganalisis penyebab meningkatnya *labor trafficking* di Thailand menggunakan konsep *policy failure*.

1.2 Rumusan Masalah

Thailand dikelompokkan ke dalam *tier 2* oleh US State Trafficking in Persons pada tahun 2022, *tier 2* tersebut menjelaskan Thailand masih belum bisa memenuhi standar yang ditetapkan menurut TVPA namun Thailand telah melakukan beberapa upaya dan usaha dalam mengikuti standar yang ditetapkan TVPA untuk melawan kasus *human trafficking* terutama *labor trafficking*.¹² Upaya Thailand mencakup pembuatan kerangka hukum dan juga perlindungan melalui pengesahan *Labor Protection Act* pada tahun 1998.¹³ Pada tahun 2008 Thailand juga melakukan pengesahan kerangka hukum untuk mengentaskan *human trafficking* yang didalamnya juga terdapat pembahasan pengentasan *labor trafficking* yaitu *Anti-TIP*, tidak sampai di situ Thailand juga bekerjasama dengan

¹²“Thailand - United States Department of State,” *United States Department of State*, terakhir diubah 5 Agustus 2021, diakses pada 16 Desember 2022, <https://www.state.gov/reports/2021-trafficking-in-persons-report/thailand/>.

¹³“Thailand.Labour Protection Act, 1998,” *Ilo.org*, terakhir diubah 2023, diakses pada 5 Maret 2023, <https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/WEBTEXT/49727/65119/E98THA01.htm>.

organisasi internasional dan juga bersama negara-negara lain dalam menghadapi kasus tersebut. *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) menjalin kerjasama dengan pihak Thailand yaitu *Thailand Institute of Justice* secara resmi pada tahun 2016, kemudian membentuk MoU bersama Laos, Kamboja, Myanmar dalam upaya memberantas migran gelap. Namun segala usaha tersebut tetap tidak membuahkan hasil yang memuaskan, oleh karena itu diperlukan analisis lebih lanjut untuk mengetahui alasan di balik meningkatnya *labor trafficking* di Thailand pada tahun 2015-2023.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, pertanyaan yang muncul untuk dibahas di bagian selanjutnya “*Apa penyebab meningkatnya labor trafficking di Thailand pada tahun 2015-2023?*”

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis penyebab meningkatnya *labor trafficking* di Thailand pada tahun 2015-2023.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Secara akademis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah referensi literatur terkait dengan *labor trafficking* khususnya Thailand.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah pengetahuan dan juga pemahaman kepada para instansi dan para pemangku kepentingan untuk dapat memahami penanganan yang tepat dalam melawan *labor trafficking* terutama dalam hal kebijakan dan memberikan kesadaran bagi masyarakat tentang bahaya dari kejahatan tersebut.

1.6 Studi Pustaka

Referensi pertama yang peneliti gunakan adalah “*The Travesty of Human Trafficking: A Decade of Failed U.S. Policy*” yang ditulis oleh Miriam Potocky, dalam tulisan ini menjelaskan permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Amerika Serikat dalam mengentaskan *human trafficking*, permasalahan tersebut dipaparkan mulai dari level paling bawah dari kebijakan tersebut, yaitu ideologi dan politik yang bias dalam melihat kebijakan yang sesuai terhadap *human trafficking*. Peneliti menemukan bahwa kedua instrumen tersebut telah menyebabkan perbedaan seperti dalam kebijakan yang dibentuk memberikan perbedaan antara jenis *human trafficking* yang terjadi antara lain *labor trafficking* dan *sex trafficking*, namun dalam undang-undang yang dibentuk belum memisahkan *human trafficking* tersebut menjadi dua jenis yang berbeda. Hal tersebut disebabkan oleh tekanan yang diberikan oleh dua kelompok yang berbeda dengan intensi yang berbeda, kelompok bisnis Amerika Serikat menuntut untuk memasukkan *forced labor* sebagai bentuk dari *human trafficking*, namun di pihak lain yaitu kelompok anti-prostitusi yang didominasi oleh Kristen konservatif dan beberapa kelompok feminis menuntut pemberantasan terhadap seks komersial.¹⁴

Hal tersebut menyebabkan definisi *human trafficking* menjadi alat dalam mencapai kepentingan dari kelompok daripada berguna dalam mencapai tujuan awal dari kebijakan tersebut. Tulisan ini berkontribusi terhadap penelitian peneliti khususnya dalam memahami permasalahan dalam pembentukan sebuah kebijakan terutama yang berfokus terhadap *human trafficking*. Perbedaan tulisan ini dengan penelitian peneliti adalah dalam tulisan ini menyajikan tentang analisis yang

¹⁴Miriam Potocky, “The Travesty of Human Trafficking: A Decade of Failed U.S. Policy,” *Social Work* 55, no. 4 (2010): 373–375, <https://www.jstor.org/stable/23719716>.

menyebabkan kegagalan kebijakan yang dihadapi oleh pemerintah Amerika Serikat tentang *human trafficking* sedangkan peneliti membahas tentang kegagalan kebijakan yang dihadapi oleh pemerintah Thailand dalam melawan *human trafficking*.

Referensi kedua yang peneliti gunakan adalah tulisan dari Bob Hudson, David Hunter dan Stephen Peckham yang berjudul "*Policy Failure and the policy-implementation gap: can policy support programs help?*", dalam tulisan tersebut peneliti menemukan bahwa kebijakan bisa gagal jika dilanjutkan dan hal tersebut bergantung terhadap proses implementasi dari kebijakan tersebut. Dalam tulisan ini menjelaskan ada tiga faktor utama yang menyebabkan kebijakan menjadi gagal. Pertama, ekspektasi yang terlalu tinggi oleh pemerintah maupun masyarakat. Kedua, implementasi yang dilakukan pemerintah akan menemukan perbedaan nantinya jika hal tersebut diterapkan dari level nasional ke subnasional, hal ini bisa dipengaruhi oleh anomali politik lokal pada suatu daerah yang membutuhkan pendekatan yang berbeda. Ketiga, pembuatan kebijakan kolaboratif yang tidak memadai, dalam pembentukan kebijakan akan mempertemukan aktor secara vertikal maupun horizontal, dalam tulisan ini menjelaskan bahwa lebih baik bagi para aktor untuk menemukan dasar untuk melanjutkan pembuatan kebijakan daripada mencari satu suara yang akan menyebabkan konflik dan argumen berkepanjangan. Terakhir, keanehan siklus politik, para pemangku kepentingan sangat tertarik dengan hasil jangka pendek

dan terlalu takut terhadap kata kegagalan yang akan menyebabkan mereka keluar dari permasalahan tersebut.¹⁵

Tulisan ini berkontribusi bagi penelitian peneliti dalam memberikan pandangan dari kebijakan yang gagal disebabkan oleh proses implementasi yang tidak didukung secara penuh, dikarenakan kebijakan akan gagal dengan sendirinya jika proses implementasi tidak dikuatkan dan tidak didukung dengan baik. Perbedaan tulisan ini dengan peneliti adalah peneliti lebih berfokus terhadap analisis penyebab meningkatnya *labor trafficking* di Thailand menggunakan konsep McConnell melalui proses, program dan, politik.

Referensi ketiga yang peneliti gunakan adalah "*Policy success: What is the role of implementation support programmes?*", dalam tulisan ini memaparkan bukti empiris tentang pengaruh dan juga peran dari *Implementation Support Program* (ISP) dalam membantu keberhasilan sebuah kebijakan, walaupun hal tersebut tidak memastikan sebuah kebijakan akan berhasil. Selanjutnya dalam tulisan ini menyajikan tentang pengaruh ISP terhadap kelancaran proses implementasi, dalam hal ini ISP membantu dalam melegitimasi sebuah kebijakan, serta memberikan arah untuk menghadapi permasalahan yang kompleks dengan menarik dukungan dari para pemangku kepentingan dan juga memberikan kesiapan terhadap pemerintah maupun aktor yang terlibat dalam kebijakan tersebut.¹⁶

Tulisan tersebut berkontribusi terhadap penelitian peneliti dalam memahami lebih jauh dan mendapatkan bukti dari implementasi merupakan

¹⁵ Bob Hudson, David Hunter, and Stephen Peckham, "Policy Failure and the Policy-Implementation Gap: Can Policy Support Programs Help?," *Policy Design and Practice* 2, no. 1 (January 2, 2019): 1–14, <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/25741292.2018.1540378>.

¹⁶ Stephen Peckham dkk., "Policy Success: What Is the Role of Implementation Support Programmes?," *Social Policy & Administration* 56, no. 3 (September 16, 2021): 378–393.

sebuah proses yang patut menjadi fokus bagi para pemerintah serta perlunya program dukungan yang membuktikan keseriusan pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan agar kemungkinan kebijakan tersebut berhasil semakin besar. Perbedaan penelitian peneliti dengan tulisan tersebut adalah peneliti berfokus dalam menganalisis penyebab meningkatnya *labor trafficking* di Thailand menggunakan konsep McConnell melalui tiga indikator yaitu proses, program dan politik.

Referensi keempat adalah jurnal yang berjudul “*Human Trafficking in Thailand: The Complex Contextual Factors*”, Jurnal yang ditulis oleh Otto F. von Feigenblatt menjelaskan latar belakang sejarah dari *human trafficking* di Thailand, dimulai dari periode dimana kerajaan Thailand yang terletak di tengah-tengah wilayah asia tenggara, kemudian penjelasan kenapa asia tenggara menjadi tempat tujuan utama dalam *human trafficking* dimana asia tenggara berperan sebagai tempat penerima dan penyalur tenaga kerja yang diselundupkan dan diperdagangkan.¹⁷ Dalam kajian lebih jauh peneliti membahas tentang bagaimana Thailand mendapati tempat tujuan favorit bagi para pelaku kejahatan ditambah dengan industri perikanan ilegal Thailand dan juga industri seks. Referensi tersebut berkontribusi bagi peneliti untuk memahami sejarah Thailand dan Asia tenggara terkait dengan *human trafficking*, perbedaan penelitian peneliti dengan referensi tersebut adalah peneliti lebih berfokus terhadap analisis tantangan yang dihadapi Thailand dalam melawan kasus *human trafficking*.

Referensi terakhir yang peneliti gunakan adalah tulisan yang ditulis oleh Violinda Deda, Mariana E.Buieny dan Made Sally D.Suryanti dengan judul

¹⁷ Von Feigenblatt, Otto Federico

“Assessing efforts of the Government of India and the United Nations Office on Drugs and Crime in Tackling Bride Trafficking” membahas tentang *bride trafficking* yang terjadi di India, kejahatan ini melibatkan wanita dan anak perempuan yang akan dijebak untuk di nikahkan, dan hal ini dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan tindakan kriminal seperti perbudakan, pemerkosaan, dan pelecehan pengantin yang telah dinikahkan.

Melihat fenomena tersebut UNODC ikut berpartisipasi dalam hal melawan kasus *human trafficking* di India, dalam salah satu tindakan yang diambil oleh UNODC adalah dengan membuat sebuah konvensi melalui UNTOC dengan tiga protokol utama yang membahas diantaranya *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children* yang termasuk dalam protokol pencegahan, dan selanjutnya adalah penekanan serta hukuman perdagangan manusia khususnya perempuan dan anak.¹⁸ Upaya lain juga dilakukan oleh UNODC seperti kerjasama mereka dengan Kementerian Perempuan dan Anak serta Pemerintah India untuk menjalankan program dukungan korban dalam hal mengantisipasi bagaimana dampak yang diberikan terhadap psiko-sosial korban di beberapa wilayah India. peneliti menemukan informasi di dalam artikel jurnal ini tentang bagaimana kasus-kasus *human trafficking* yang terjadi di negara lain khususnya negara berkembang yang menghadapi permasalahan *human trafficking* yang bertambah parah dengan budaya yang berkembang di negara tersebut, selain itu tulisan ini membantu peneliti untuk memahami bagaimana peran dan usaha yang dilakukan oleh

¹⁸ Deda, Violinda, Mariana E. Buiney, and Made Selly D. Suryanti. “Assessing Efforts of the Government of India and the United Nations Office on Drugs and Crime in Tackling Bride Trafficking.” *Papua Journal of Diplomacy and International Relations* 2, no. 1 (May 30, 2022): 1–15.

UNODC dalam menangani kasus *human trafficking* yang terus berkembang di India, dan bagaimana organisasi tersebut dapat bekerjasama dengan Pemerintah beserta NGO lokal di negara tersebut.

Perbedaan antara tulisan tersebut dengan penelitian peneliti adalah tulisan tersebut berfokus dalam membahas upaya dan program yang telah dibentuk oleh UNODC dalam membantu India dalam memberantas *bride trafficking*. Sedangkan peneliti membahas tentang penyebab meningkatnya *labor trafficking* di Thailand pada tahun 2015-2023. Tulisan ini berkontribusi dalam membantu peneliti dalam memahami program seperti apa yang bisa memberikan pengaruh dan menekan serta memberantas *bride trafficking* yang termasuk dalam jenis-jenis *human trafficking* di India.

1.7 Kerangka Konseptual

1.7.1 Policy Failure

Keberhasilan sebuah kebijakan merupakan sebuah hal yang sulit untuk didefinisikan, menurut Ingram dan Mann bahwa konsep keberhasilan dan kegagalan dalam konteks kebijakan sering menggunakan pandangan yang subjektivitas yang terlihat pada tujuan dari individu tersebut yang terkadang memiliki kecenderungan tersendiri dalam pemikirannya.¹⁹ Thomas Smith melanjutkan elaborasi mereka bahwa dalam menentukan kegagalan kebijakan, didalamnya terdapat banyak keterlibatan mulai dari individu, kelompok, organisasi dan juga pemangku kepentingan yang mereka mempunyai pengaruh dalam mengevaluasi sebuah kebijakan, jadi sebuah kebijakan akan berhasil bagi beberapa kelompok namun kelompok lain bisa jadi menilai kebijakan tersebut

¹⁹ Thomas B. Smith, "Analysis of Policy Failure: A Three Dimensional Framework," *Indian Journal of Public Administration* 35, no. 1 (January 1989): 1-15.

gagal. Entitas yang berbeda akan memberikan pandangan yang berbeda juga, serta menilai sebuah kebijakan tersebut dengan nilai dan standar tertentu dalam menghakimi sebuah kebijakan.

Menurut Kai Oppermann dan Alexander Spencer menjelaskan bahwa *policy failure* dan *foreign policy fiasco* merupakan kedua entitas yang tidak boleh dipisahkan. Hal tersebut dikarenakan pembahasan kegagalan *public policy* bermanfaat dalam membuka sebuah pemahaman terhadap kegagalan *foreign policy* dan begitu juga sebaliknya. Kegagalan *foreign policy* dapat melampaui permasalahan dan gagasan tradisional mengenai diplomasi dan keamanan dengan mencakup isu-isu kebijakan publik dalam menganalisis permasalahan kebijakan agar dapat menganalisis sebuah fenomena secara lebih luas. Kegagalan *public policy* juga bermanfaat bagi kegagalan *foreign policy*, seperti *foreign policy* yang berfokus dalam menjelaskan kegagalan pada bagian program/kebijakan pada konsep McConnell dapat memperluas pembahasan terhadap kegagalan politik didalam negeri secara sistematis.²⁰ Secara keseluruhan dan mengutip dari McConnell bahwa *policy failure* dapat bermanfaat dalam menganalisis kegagalan kebijakan luar negeri melalui tiga indikator utama *policy as process*, *policy as programmes*, dan *policy as politics*.

Menurut McConnell, *policy failure* didefinisikan sebagai kebijakan gagal walaupun kebijakan tersebut berhasil dalam mencapai beberapa aspek namun tidak berhasil dalam mencapai tujuan yang menjadi dasar dari kebijakan tersebut. Suatu kebijakan mungkin bisa berhasil dalam tahap pengesahannya, namun jika kebijakan tersebut gagal dalam mendapatkan dukungan maupun dalam

²⁰ Kai Oppermann and Alexander Spencer, "Studying Fiascos: Bringing Public and Foreign Policy Together," *Journal of European Public Policy* 23, no. 5 (February 6, 2016): 643–652.

menghadapi tantangan yang terjadi dilapangan akan menyebabkan kebijakan tersebut kurang efektif untuk diterapkan, namun jika kebijakan yang dibuat gagal dalam menghadapi tantangan tetapi mendapatkan dukungan yang kuat kemungkinan kebijakan tersebut dapat dilanjutkan.²¹

Keberhasilan dan kegagalan kebijakan sangat dipengaruhi oleh dua faktor penting yaitu dukungan dari pihak oposisi dan koalisi, kebijakan mungkin saja terbentuk walaupun tidak mendapatkan dukungan namun kebijakan tersebut berkemungkinan besar gagal untuk diimplementasikan dan berujung terhadap penghentian kebijakan. Kebijakan juga bisa gagal dikarenakan ketidaksesuaian dari instansi pemerintah sebagai dasar sebuah kebijakan yang menyebabkan kebijakan tersebut berubah berdasarkan apa yang dipahami pemerintah untuk mencapai tujuan mereka. Intensi pemerintah akan berbeda dengan sebuah kelompok, dan kelompok tersebut juga belum tentu mempunyai intensi yang sama dengan kelompok lain maupun individu lain. Perbedaan tersebut menciptakan sebuah dimensional kegagalan dan keberhasilan sebuah kebijakan menjadi luas untuk dijelaskan hal ini dikarenakan komponen tersebut didasarkan terhadap sudut pandang, dampak, dan target serta tujuan yang berbeda bagi masing-masing kelompok.

McConnell menjelaskan ada tiga indikator utama yang menjadi pondasi dalam melihat kegagalan kebijakan diantaranya adalah proses, program dan politik.²² Pada indikator proses akan menilai bagaimana upaya dan usaha pemerintah dalam pembuatan proses kebijakan, apakah dalam proses kebijakan

²¹ Allan McConnell, "What Is Policy Failure? A Primer to Help Navigate the Maze," *Public Policy and Administration* 30, no. 3–4 (February 4, 2015): 221–242.

²² Allan McConnell. "Why do policies fail? A starting point for exploration." *Political Studies Association (PSA) 64th Annual International Conference*. 2014.

tersebut berupaya dalam menyelesaikan permasalahan ataupun mencapai tujuan yang akan dicapai, dalam indikator proses juga akan melihat apakah para pembuat kebijakan berhasil dalam mendapatkan persetujuan terkait dengan kebijakan yang dibuat. Kegagalan proses akan memudahkan dalam memahami aspek-aspek utama dari kegagalan tersebut dan memberikan sebuah standar dalam menilai kegagalan dari sebuah kebijakan. Kegagalan dalam proses pembuatan kebijakan ini akan memiliki dimensional yang luas, hal tersebut dikarenakan kegagalan tersebut mungkin terjadi di beberapa tingkatan dalam membentuk kebijakan yang diharapkan. Kegagalan dalam proses juga mempertanyakan bagaimana sebuah kebijakan bisa terbentuk dan legitimasi dari pembentukan kebijakan juga menjadi poin penting dalam menilai kesuksesan dari kebijakan tersebut, mungkin dalam pembentukan kebijakan tersebut mendapatkan banyak atau sedikit dukungan dari otoritas yang mempunyai kepentingan maupun masyarakat.

Pada indikator ini ada beberapa area yang dinilai dalam melihat proses dari kebijakan tersebut antara lain adalah bagaimana pemerintah dalam mencapai tujuan dan mempertahankan kebijakan tersebut. Kedua, proses dalam pembuatan termasuk didalamnya upaya dalam membahas dan merundingkan kebijakan pada tahap legitimasi kebijakan. Ketiga, upaya yang dilakukan pemerintah dalam membangun sebuah jaringan kerjasama yang berkelanjutan. Keempat, bagaimana upaya yang dilakukan dalam membentuk pengaruh dan dapat membentuk pemahaman terdapatnya inovasi didalam kebijakan yang dibentuk, dan yang terakhir adalah proses kebijakan akan menilai kebijakan yang dibentuk apakah menimbulkan peningkatan pihak oposisi atau kebijakan tersebut berhasil dalam

menggiring masyarakat dan mendapatkan dukungan secara universal tanpa ada pihak oposisi.

Tabel 1.1 Tingkat Kegagalan *Policy as Process*

| No | Kriteria | <i>Process Success</i> | <i>Tolerable failure</i> | <i>Conflicted failure</i> | <i>Borderline failure</i> |
|--------------------------|---|--|--|---|--|
| <i>Policy as Process</i> | | | | | |
| 1 | Mempertahankan tujuan dan instrumen kebijakan | Pemerintah berhasil mencapai tujuan dan mempertahankan instrumen kebijakan | Tujuan kebijakan dan instrumen dapat dipertahankan disamping adanya sedikit kegagalan dalam mencapai tujuan | Tujuan dan instrumen yang direncanakan terbukti bermasalah dan sulit untuk dipertahankan serta diperlukan revisi | Pemerintah tidak dapat mencapai tujuan dan instrumen kebijakan yang dibentuk |
| 2 | Mengamankan legitimasi | Pemerintah berhasil melegitimasi kebijakan tanpa permasalahan yang berlanjut | Ada beberapa tantangan dalam mencapai legitimasi namun tidak ada permasalahan yang signifikan | Adanya kesulitan dan perdebatan seputar kebijakan dan adanya potensi kecacatan dari kebijakan tersebut jika dilanjutkan | Kebijakan tersebut tidak dilegitimasi |
| 3 | Koalisi yang berlanjut | Pemerintah berhasil membangun koalisi yang berkelanjutan | Koalisi yang utuh walaupun ada beberapa tanda-tanda adanya ketidaksepakatan | Koalisi utuh, namun adanya kesepakatan yang kuat dan adanya potensi terpecahnya koalisi | Tidak adanya koalisi yang berkelanjutan |
| 4 | Mendapatkan dukungan terhadap kebijakan yang dibentuk | Pemerintah mendapatkan dukungan penuh terhadap kebijakan yang dibentuk atau tidak adanya pihak oposisi | Ada beberapa pihak yang oposisi terhadap kebijakan namun ditutupi oleh banyaknya dukungan terhadap kebijakan | Pihak oposisi dan pihak yang mendukung seimbang | Pihak oposisi mendominasi atau tidak adanya pihak yang mendukung |

Sumber: Diadopsi dari *policy failure* oleh McConnell

Indikator kedua adalah program, McConnell menggunakan kata program untuk menghindari bentrokan terhadap fenomena kegagalan kebijakan yang luas.

McConnell menyebutkan bahwa kebijakan akan didefinisikan sukses jika kebijakan yang dibuat dapat mencapai apa yang diharapkan oleh pemerintah sebagai hasil yang dinilai melalui komponen yang ditetapkan oleh pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. *Outcomes* dari kebijakan yang sukses dapat memberikan kriteria-kriteria tertentu dalam implementasi kebijakan selanjutnya untuk menghasilkan *outcomes* yang diinginkan. *Outcomes* tersebut akan dinilai melalui komponen yang spesifik seperti implementasi yang terjadi dalam pembuatan kebijakan sebelumnya dan apakah kebijakan tersebut mencapai hasil yang diharapkan sebelumnya dan juga bagaimana kebijakan tersebut dapat mempengaruhi kelompok yang menjadi target dari kebijakan tersebut.

Sebuah kebijakan bisa menjadi tolok ukur dalam menilai kebijakan selanjutnya dalam melihat kesuksesan dari kebijakan tersebut, dalam hal ini bisa dinilai dari efisiensi dari kebijakan yang diterapkan baik itu dalam hal anggaran keuangan maupun kerahasiaan yang berkaitan dengan keamanan negara. Program-program tersebut dibuat oleh pemerintah demi mencapai tujuan yang diperkuat dengan asumsi seberapa besar intervensi dari pemerintah yang berpengaruh terhadap masyarakat, hal ini dapat dilihat dari kebijakan pemerintah yang bersifat persuasif contohnya kampanye, pemberian subsidi, insentif, dan hukuman serta kebijakan yang berusaha untuk mengatur perilaku masyarakat.

Pada indikator kedua, McConnell memberikan beberapa subindikator dalam menilai apakah kebijakan tersebut gagal pada program dalam pembuatan kebijakan. Pertama, dalam melihat kesuksesan program diperlukan upaya pemerintah dalam pengimplementasian kebijakan sesuai dengan tujuan awal dari kebijakan tersebut. Kedua, kebijakan yang dibentuk dapat mencapai tujuan

ataupun hasil yang diharapkan. Ketiga, kebijakan yang dibentuk berhasil memberikan keuntungan serta mempengaruhi kelompok sasaran. Keempat, kebijakan yang dibentuk berhasil dalam mendominasi dan mendapatkan respon positif dari masyarakat. Terakhir, kebijakan yang dibentuk berhasil menarik dukungan baik itu di masyarakat maupun dukungan yang didapatkan dari pihak oposisi untuk tujuan kebijakan maupun sebagai sarana dalam mencapai tujuan kebijakan.

Tabel 1.2 Tingkat Kegagalan *Policy as Program*

| No | Kriteria | <i>Program Success</i> | <i>Tolerable failure</i> | <i>Conflicted failure</i> | <i>Borderline failure</i> |
|--------------------------|------------------------------------|---|---|--|--|
| <i>Policy as Program</i> | | | | | |
| 1 | Implementasi sejalan dengan tujuan | Pemerintah berhasil mengimplemen tasikan kebijakan yang sejalan dengan tujuan yang dibentuk | Hasil implementasi sesuai dengan tujuan disamping adanya sedikit kegagalan kecil dan adanya penyimpangan | Hasil yang didapatkan beragam dan beberapa keberhasilan namun juga terdapat kegagalan yang tidak terduga dan kegagalan yang bermasalah | Walaupun kemajuan menuju implementasi kecil tidak seperti apa yang direncanakan namun program mengalami kegagalan yang parah dan terbukti bermasalah dan sulit untuk dipertahankan |
| 2 | Mencapai hasil yang diinginkan | Pemerintah berhasil mencapai hasil yang diinginkan | Beberapa tujuan berhasil dicapai namun diimbangi hasil yang tidak diinginkan dan menyebabkan terjadinya permasalahan yang tidak terselesaikan | Sebagian hasil yang direncanakan tercapai namun tidak mencapai hasil yang luas dan program mengalami kegagalan yang parah | sebagian kecil dapat dicapai, namun didominasi oleh hasil yang menyebabkan permasalahan dan kegagalan yang kontroversial |
| 3 | Menguntungkan kelompok | Kebijakan berhasil | Kebijakan berhasil | Kelompok sasaran mendapatkan | Kelompok sasaran |

| | | | | | |
|----|---|--|---|---|---|
| | sasaran | memberikan dampak positif terhadap kelompok sasaran | memberikan dampak positif yang luas terhadap kelompok sasaran namun masih ada sedikit permasalahan yang timbul | manfaat parsial, namun tidak seluas seperti apa yang direncanakan | mendapatkan dampak yang positif namun didominasi oleh dampak negatif yang didapatkan oleh kelompok sasaran dan juga bisa mengakibatkan adanya ketidakadilan dan penderitaan yang dirasakan kelompok sasaran |
| 4 | Kebijakan memenuhi kriteria yang diperlukan | Kebijakan berhasil memenuhi kriteria yang diperlukan dalam mencapai tujuan | Hasil yang diinginkan tidak tercapai secara menyeluruh namun hal tersebut dapat memenuhi kriteria yang diperlukan dalam mencapai tujuan kebijakan | Berhasil mencapai sebagian hasil namun disertai dengan kegagalan untuk mencapainya | Beberapa tujuan berhasil dicapai namun sedikit dan hal tersebut diperparah dengan perhatian media yang tidak diinginkan |
| 5. | Program berhasil menarik dukungan | | Adanya penentangan terhadap tujuan program dan nilai yang melebihi dari apa yang diperkirakan namun dapat ditutupi dengan banyaknya dukungan | Adanya pertentangan terhadap tujuan program dan nilai namun diimbangi dengan dukungan yang sama | Adanya pertentangan terhadap tujuan dan nilai namun hal tersebut tidak dapat diimbangi dengan dukungan yang ada |

Sumber: Diadopsi dari *policy failure* oleh McConnell

Indikator ketiga dalam menilai kegagalan sebuah kebijakan adalah politik, pemerintah membentuk sebuah kebijakan dalam menanggapi konflik yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Peran pemerintah menjadi kunci dalam penyelesaian konflik yang ada, peran pemerintah tersebut mencakup dari pembentukan opini masyarakat terhadap sebuah isu, perdebatan, dan termasuk didalamnya bagaimana

pemerintah bisa mengorganisir sebuah konflik tersebut, dan juga bagaimana pemerintah dapat menyelesaikan permasalahan dan urusan pemerintahan serta visi dari kebijakan. Kebijakan akan mempengaruhi bagaimana sebuah politik itu berjalan dan begitu pula sebaliknya politik bisa membentuk kebijakan yang akan dibuat. Sebuah kebijakan mungkin gagal dalam mencapai tujuan politik yang dimaksudkan, dan hal ini bisa berpengaruh terhadap reputasi seseorang ataupun pemerintah yang akan menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat, dan juga pemerintah bisa kehilangan kontrol dalam mengelola konflik muncul.

Policy as politics didalamnya terdapat empat subindikator dalam menilai tingkat kegagalan dari sebuah kebijakan. Pertama, kebijakan dapat menjadi media dalam mendapatkan dukungan terhadap pemilihan dan juga tempat untuk mendapatkan dukungan maupun dalam meningkatkan reputasi. Kedua, kebijakan berjalan dengan baik dan hal tersebut memberikan keringanan bagi pemerintah dan mengurangi pekerjaan maupun urusan pemerintah, dan memberikan banyak waktu serta sumber daya politik yang efisien memberikan ruang pemerintah untuk berfokus terhadap hal lain. Ketiga, upaya pemerintah dalam mempromosikan apa yang diinginkan pemerintah melalui suatu jalur yang ditetapkan, dalam hal ini akan menilai apakah promosi yang dilakukan oleh pemerintah memerlukan beberapa penyempurnaan atau diperlukannya perbaikan secara keseluruhan untuk mendukung promosi yang sejalan dengan yang diinginkan oleh pemerintah. Terakhir, upaya pemerintah akan dinilai apakah memberikan keuntungan politik terhadap pemerintah atau malah menyebabkan pihak oposisi mendapatkan keuntungan politik yang lebih besar dari pemerintah perkiraan.

Tabel 1.3 Tingkat Kegagalan *Policy as Politics*

| No | Kriteria | <i>Political Success</i> | <i>Tolerable failure</i> | <i>Conflicted failure</i> | <i>Borderline failure</i> |
|----------------------------|---|--|--|---|--|
| <i>Process as Politics</i> | | | | | |
| 1 | Memperkuat prospek dan reputasi dalam pemilihan | Kebijakan berhasil membawa dampak positif dan menguntungkan terhadap pemilihan umum | Kebijakan berhasil mendapatkan dukungan dalam pemilihan umum dan meningkatkan reputasi meskipun ada sebagian kecil reputasi mengalami kemunduran | Kebijakan menghasilkan reputasi serta dukungan yang seimbang dalam pemilihan umum | Kebijakan menghasilkan dukungan dan reputasi dalam pemilu yang sedikit, namun cukup memberikan bukti bahwa kebijakan mempengaruhi pemilu dan reputasi secara keseluruhan |
| 2 | Mempermudah urusan pemerintah | Kebijakan berhasil mempermudah pekerjaan pemerintah | Walaupun kebijakan mendatangkan beberapa permasalahan dalam agenda pemerintah namun kapasitas pemerintah tidak terganggu | Kebijakan yang dibentuk terbukti kontroversial dan menyebabkan banyak waktu yang tersita dan sumber daya politik untuk mempertahankan kebijakan | Kebijakan membuat pemerintah berjuang keras dalam menekan permasalahan yang sulit melalui politik |
| 3 | upaya pemerintah dalam mempromosikan apa yang diinginkan pemerintah melalui suatu jalur yang ditetapkan | Pemerintah berhasil mempromosikan hal yang ingin dicapai dan disampaikan melalui jalur yang ditetapkan | Ada beberapa penyempurnaan yang dilakukan untuk mencapai dan mempromosikan apa yang diinginkan pemerintah namun tidak memberikan halangan | Keinginan pemerintah terlalu luas sejalan dengan tujuan namun diperlukannya pembahasan ulang | Keinginan pemerintah terancam ditentang dan dibahas ulang dalam mencapai kesepakatan |

| | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|
| 4 | Memberikan manfaat politik bagi pemerintah | Kebijakan berhasil memberikan manfaat politik terhadap pemerintah secara luas | Meskipun pihak oposisi banyak mendapatkan manfaat politik dari yang diperkirakan pemerintah namun hal tersebut masih ditutupi oleh manfaat politik yang didapatkan oleh dukungan | Oposisi dan dukungan seimbang terhadap manfaat politik | Oposisi mendapatkan manfaat politik suatu kebijakan pemerintah yang lebih besar dari pada dukungan yang didapatkan |
|---|--|---|--|--|--|

Sumber: Diadopsi dari *policy failure* oleh McConnell

McConnell juga menyajikan beberapa tingkatan kegagalan diantaranya adalah *tolerable failure*, *conflicted failure*, dan *borderline failure*. *Tolerable failure* dipahami sebagai kebijakan tersebut mengalami sedikit kegagalan namun ditutupi oleh keberhasilan dari kebijakan itu sendiri. *Conflicted failure* menjelaskan bahwa keberhasilan dan kegagalan dari kebijakan tersebut seimbang hal ini dikarenakan kebijakan tersebut mendapatkan banyak kritik dan juga mendapatkan banyak dukungan. *Borderline failure* merupakan tingkat kegagalan yang paling parah, jika suatu kegagalan berada pada tingkat ini maka akan dipastikan kebijakan tersebut berada pada ambang kegagalan.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dalam menyusun penelitian ini. Pendekatan kualitatif didefinisikan oleh Denzin dan Lincoln sebagai aktivitas yang dilakukan untuk dapat mengamati dan memahami fenomena lebih dalam secara alami. Pendekatan ini berusaha untuk mengkonstruksi realitas berdasarkan tulisan ilmiah termasuk didalamnya buku,

jurnal, artikel, maupun literatur yang membahas fenomena terkait untuk mendapatkan makna dan pemahaman dari data yang didapatkan.²³

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah deskriptif-analitis. Deskriptif-analitis dipahami sebagai salah satu pendekatan dengan menggambarkan sebuah fenomena yang terjadi di lapangan secara akurat berdasarkan data-data yang peneliti temukan untuk dapat dianalisis lebih lanjut.²⁴ Peneliti memilih jenis penelitian ini untuk dapat menggambarkan dan menjelaskan apa penyebab meningkatnya kasus *labor trafficking* di Thailand menggunakan teori *policy failure*.

1.8.2 Batasan Penelitian

Penelitian ini membahas tentang alasan mengapa pemerintah Thailand gagal dalam melawan kasus *labor trafficking*. Peneliti membatasi penelitian mulai dari tahun 2015 sampai 2023 agar pembahasan dalam rumusan masalah tidak melebar. Jangka waktu tersebut dijadikan sebagai awal tahun penelitian dikarenakan pada tahun tersebut banyak laporan melalui media berita tentang praktik tenaga kerja budak di industri laut Thailand, hal tersebut dapat dilihat pada laporan yang dirilis *Associated Press* menjelaskan bahwa hampir 4000 korban Thailand terdampar ke pulau-pulau kecil di Indonesia.²⁵ Tahun 2023 dijadikan sebagai batasan penelitian karena tahun tersebut merupakan tahun terakhir pemerintah Thailand mengeluarkan laporan resmi tentang *human trafficking* di negara tersebut.

²³ Denzin, Norman K, and Yvonna S Lincoln. *The Sage Handbook of Qualitative Research*. Los Angeles, Sage, 2018, hal. 43

²⁴ Ismail Nurdin and Sri Hartati, Metodologi Penelitian Sosial, ed. Lutfiah, *Journal of Visual Languages & Computing*, vol. 11, hal. 251 (Surabaya: Penerbit Media Sahabat Cendekia, 2019).

²⁵ Surangrut Jumnianpol dan Nithi Nuangjamnong

1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis

Unit analisis didefinisikan sebagai objek kajian yang akan dideskripsikan, digambarkan, diteliti secara lebih lanjut dalam menganalisis data yang didapatkan. Unit analisis disebut juga dengan variabel dependen, unit analisis dalam penelitian ini adalah Thailand. Selanjutnya unit eksplanasi adalah variabel yang memberikan pengaruh atau dampak terhadap unit yang akan dijelaskan lebih lanjut, unit eksplanasi juga disebut dengan variabel independen. Dalam penelitian ini unit eksplanasinya adalah *labor trafficking* pada tahun 2015-2023.²⁶

Ada tiga tingkat model hubungan antara unit analisis dengan unit eksplanasi dalam penelitian, diantaranya adalah reduksionis, korelasionis, induksionis. Reduksionis dipahami sebagai penelitian yang unit eksplanasinya lebih rendah dari pada unit analisis, korelasionis dipahami sebagai unit eksplanasi dengan unit analisis berada pada tingkat yang sama, dan induksionis dipahami sebagai unit eksplanasi lebih tinggi dari pada unit analisis. Tingkat analisis pada penelitian ini adalah korelasionis, dikarenakan unit eksplanasi penelitian ini berada pada tingkat negara yaitu peningkatan *labor trafficking* dan unit analisisnya adalah kebijakan Thailand yang juga berada pada tingkat negara.²⁷

John Spanier menjelaskan bahwa ada tiga tingkat analisis diantaranya adalah tingkat sistem, tingkat negara atau bangsa, dan tingkat individu.²⁸ Penelitian ini menggunakan tingkat analisis pada tingkat negara karena permasalahan yang akan diteliti adalah penyebab meningkatnya *labor trafficking* di Thailand.

²⁶ Mohtar Mas'ood, Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin Dan Metodologi

²⁷ Mohtar Mas'ood, Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin Dan Metodologi

²⁸ Mohtar Mas'ood, Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin Dan Metodologi

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan metode pengumpulan data sekunder, pengumpulan data yang dilakukan menggunakan teknik studi kepustakaan. Studi kepustakaan dipahami sebagai sebuah proses dalam mengidentifikasi dan menemukan sumber-sumber informasi yang dapat memberikan informasi faktual atau pendapat para ahli yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian. Sumber informasi yang digunakan dalam teknik studi kepustakaan diantaranya adalah buku, jurnal, artikel jurnal, laporan, presentasi, buku biografi, catatan perkuliahan.²⁹

Peneliti menggunakan sumber-sumber data dari buku diantaranya adalah *Fighting Modern Slavery and Human, The Sage Handbook of Qualitative Research*, Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin Dan Metodologi, dan Buku Metodologi Penelitian Sosial. Sumber lain yang peneliti gunakan sebagai sumber penelitian adalah jurnal ilmiah, jurnal tersebut diantaranya adalah *Journal of Asia Pacific Studies, Journal of Law and Legal Reform, Human Security Norms in East Asia, Social Work, Policy Design and Practice, Social Policy & Administration, Indian Journal of Public Administration, Public Policy and Administration, Political Studies Association (PSA), International Political Science Review, Papua Journal of Diplomacy and International Relations*. Selanjutnya peneliti menggunakan data yang dirilis melalui website pemerintah seperti *U.S. Department of State dan Royal Thai Government*. Terakhir peneliti menggunakan sumber data yang diperoleh dari *International Governmental Organizations (IGO)* yaitu *International United Nations (UN), UNODC dan International Labour Organization (ILO)*.

²⁹Mary W.George, "The Elements of Library Research:What Every Student Needs to Know", (Princeton University Press,New Jersey:2008):8.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan tahapan analisis data yang ditulis oleh Matthew B. Miles dan A. Michael Hubberman, menurut mereka dalam menganalisis sebuah kajian ada tiga tahapan yang dilakukan diantaranya adalah reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.³⁰

1. Reduksi data

Tahap ini dipahami sebagai proses dalam memilih fokus dalam penelitian, melakukan penyederhanaan, pengabstrakan, dan mengubah data yang didapatkan seperti jurnal, laporan, buku dan bentuk data lainnya yang digunakan sebagai referensi dalam penelitian. Pada tahap ini peneliti melakukan reduksi data dengan memilih fokus penelitian menggunakan kata kunci *human trafficking*, *labor trafficking*, *policy failure*, Thailand. Kata kunci tersebut peneliti gunakan sebagai acuan untuk mendapatkan data yang sesuai dengan kajian peneliti untuk memudahkan peneliti dalam melakukan reduksi data.

2. Penyajian data

Pada tahap ini dalam menganalisis data diperlukan kumpulan informasi yang sudah dikelompokkan dan inti informasi-informasi yang diperoleh dalam memudahkan proses penarikan kesimpulan nantinya. Kumpulan informasi tersebut akan digunakan untuk membentuk sebuah uraian berdasarkan data yang diperoleh pada tahap reduksi data, uraian tersebut berisikan pembahasan tentang penyebab meningkatnya *labor trafficking* yang terjadi di Thailand.

³⁰Matthew B Miles and A Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis an Expanded Sourcebook*, 2nd ed. (Thousand Oaks: Sage, 1994), 11.

3. Penarikan kesimpulan

Tahap ini merupakan tahap akhir yang bertujuan untuk mendapatkan kesimpulan berdasarkan penjelasan data yang peneliti dapatkan kemudian peneliti akan menarik kesimpulan secara keseluruhan termasuk analisis yang telah peneliti temui.

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini peneliti akan membahas latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka, kerangka konseptual, dan metodologi serta sistematika penulisan dalam penelitian ini.

BAB II LABOR TRAFFICKING DI THAILAND

Dalam bab ini peneliti akan memaparkan penjelasan tentang definisi dan dinamika perkembangan *labor trafficking* yang terjadi di Thailand. Pada bab ini akan diawali dengan melihat bagaimana sejarah awal terjadinya *labor trafficking* di Thailand.

BAB III KEBIJAKAN THAILAND DALAM MELAWAN LABOR TRAFFICKING

Pada bab ini peneliti akan menjabarkan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Thailand dari waktu ke waktu, termasuk didalamnya upaya yang dilakukan oleh Thailand dalam membentuk kebijakan baik itu dalam lingkup domestik, regional, maupun internasional.

BAB IV ANALISIS PENYEBAB MENINGKATNYA LABOR TRAFFICKING DI THAILAND

Bab ini akan menjelaskan permasalahan dalam penelitian yang membahas tentang penyebab meningkatnya *labor trafficking* yang dianalisis menggunakan konsep *policy failure* menurut McConnell melalui tiga komponen utama dalam konsep *policy failure*, komponen tersebut mencakup *process*, *program*, dan *politics*.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini menjadi akhir dari penulisan penelitian yang berisikan tentang kesimpulan dan saran terkait penelitian peneliti.

